



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**

RLPPD 2024

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

Jalan Pahlawan Nomor 1 - Singaraja

(0362) 21985 📞

pemerintahansetda.bulelengkab.go.id 🌐

pemerintahansetda@bulelengkab.go.id @



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Daerah, serta Inovasi Daerah.

RLPDD merupakan informasi yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat dengan muatan capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, dan disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif.

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 1
Indikator Makro Kabupaten Buleleng
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,97	74,52	1,00
2	Angka Kemiskinan (persen)	5,85	5,39	0,96
3	Angka Pengangguran (persen)	3,60	2,06	0,57
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,64	5,04	1,38
5	Pendapatan Per kapita (juta rupiah)	13.987	14.377	1,02
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,314	0,279	0,88

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng Tahun 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng Tahun 2024 mengalami kenaikan 1,00 poin, yang mana pada Tahun 2023 berada di angka 73,97 menjadi 74,52.

2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan pada Tahun 2024 mengalami Penurunan 0,96 poin, yang mana pada Tahun 2023 capaian kinerjanya adalah 5,85 menjadi 5,39.

3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran pada Tahun 2024 mengalami Penurunn 0,57 poin, yang mana pada Tahun 2023 capaian kinerjanya adalah 3,60 menjadi 2,06.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar - 1,38 poin, yang mana pada Tahun 2023 capaian kinerjanya adalah 3,64 menjadi 5,04.

5. Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)

Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) mengalami Kenaikan sebesar 1,02 yang mana pada Tahun 2023 capaian kinerjanya 13,987 sedangkan pada Tahun 2024 capaian kinerjanya 14,377

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Adapun untuk indicator ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Buleleng menurut data BPS Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 mengalami Penurunan 0,88 poin, yang mana pada Tahun 2023 berada di angka 0,314 di Tahun 2024 menjadi 0,279.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Tabel 2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome
Tahun 2024

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 23.284 ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 26.475	87,94%
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 80.735 ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 84.064	96,03%
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 39.944 ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 42.988	92,91%
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 376 ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan = 419	89,73%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buleleng Tahun 2024

B. Urusan Kesehatan

Tabel 3
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome
Tahun 2024

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 958 ----- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten/kota = 826.193	1,15%
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 10 ----- x 100 % Jumlah RS di kabupaten/kota = 10	100%
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 1.105 ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 1.105	100%
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 1.007 ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 1.007	100%
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 998 ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 998	100%
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 1.232 ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/kota = 1.232	100%
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.221 ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 5.221	100%
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 3.935 ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 3.935	100%

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 1.177 ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 1.177	100%
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 896 ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 896	100%
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 556 ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 556	100%
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 69 ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 69	100%
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 194 ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 194	100%
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 306 ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 306	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng Tahun 2024

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 4
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome
Tahun 2024

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan,54 banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	0
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) =0 -----x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1	0

1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting =9.509,643 ----- x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 12.036	79,01%
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 228.201 ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 253.546	90,00%
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 246.519 ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A = 260.732	94,54 %
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = - ----- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku = -	-%
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 757,95 ----- X 100% Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 1.406,19	79,79%
1.c.8.1	Rasio tenaga Operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 76 ----- x 100 % Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 685	11,09%
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 34 ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 34	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng Tahun 2024

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 5
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome
Tahun 2024

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIA N
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 5 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 5	100%
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0	-
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 1,458 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 7,29	20%
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 4.632 ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 227.360	2.037%
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 1.811 ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota = 227.360	0.79%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Buleleng Tahun 2024

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 6
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcomem Tahun 2024

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIA N
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yangditangani = 89 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 89	100%
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 17 ----- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi = 22	77,27%
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana= 9.237 ----- X 100% Jumlah warga negara yang memperoleh	100%

		layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan= 9.237	
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana= 1.766 $\frac{1.766}{9.237} \times 100\%$ Jumlah warga nega yan berada dikawasan rawan bencana= 1.766	100%
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana =119 $\frac{119}{119} \times 100\%$ Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan =119	100%
1.e.6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yangditangani = 167 $\frac{167}{185} \times 100\%$ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 185	90.27%
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	9.15 menit

Sumber : Dinas Satpolpp dan Damkar, BPBD Kab. Buleleng Tahun 2024

F. Urusan Sosial

Tabel 7
Capaian Kinerja Urusan Sosial Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome Tahun 2024

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 2.516 $\frac{2.516}{2.555} \times 100\%$ Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 2.555	98,47%
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 243 $\frac{243}{243} \times 100\%$ Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 243	100%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buleleng Tahun 2024

3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2024 hasilnya belum keluar dan Adapun Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 mendapat Opini wajar Tanpa Pengecualian.

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, kemudian ditegaskan di ayat 2 bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat 3 dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan rujukan ketentuan perundangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan dokumen operasional RPJMD untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan APBD Kabupaten Buleleng dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023.

Didalam perjalanan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan-perubahan kebijakan baik pendapatan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan asumsi APBN serta beberapa program dan kegiatan yang digulirkan kepada APBD Kabupaten Buleleng membawa konsekuensi adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pada Pasal 16 ayat (2) perubahan APBD dapat dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Tabel 8
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.613.546.396.015,00	2.469.141.037.090,42	94,47	2.216.868.306.839,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	575.417.310.612,00	509.474.781.931,42	88,54	460.500.058.608,71
4.1.01	Pajak Daerah	244.589.116.850,00	251.938.986.446,77	103,00	221.543.885.845,93
4.1.02	Retribusi Daerah	33.886.640.000,00	29.404.398.277,45	86,77	34.103.424.122,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.431.505.390,00	30.720.076.754,33	97,74	24.631.695.198,13
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	265.510.048.372,00	197.411.320.452,87	74,35	180.221.053.442,65
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	575.417.310.612,00	509.474.781.931,42	88,54	460.500.058.608,71
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.993.128.883.917,00	1.924.561.119.762,00	96,56	1.723.164.796.195,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.570.767.390.000,00	1.505.731.459.581,00	95,86	1.490.499.259.965,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	422.361.493.917,00	418.829.660.181,00	99,16	232.665.536.230,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.201.486,00	35.105.135.397,00	78,01	33.203.452.035,65
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.201.486,00	35.105.135.397,00	78,01	33.203.452.035,65
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.201.486,00	35.105.135.397,00	78,01	33.203.452.035,65
	JUMLAH PENDAPATAN	2.613.546.396.015,00	2.469.141.037.090,42	94,47	2.216.868.306.839,36
5	BELANJA DAERAH	2.675.660.392.649,00	2.407.468.033.993,48	89,98	2.205.123.101.991,13
5.1	BELANJA OPERASI	2.063.320.603.555,00	1.937.530.992.909,43	93,90	1.752.101.099.431,13
5.1.01	Belanja Pegawai	1.198.133.455.499,70	1.155.034.072.443,70	96,40	954.572.961.969,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.916.411.019,30	643.226.108.409,73	89,47	674.925.968.501,13
5.1.05	Belanja Hibah	137.578.437.036,00	131.378.812.056,00	95,49	110.657.841.961,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.692.300.000,00	7.892.000.000,00	90,79	11.944.327.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.063.320.603.555,00	1.937.530.992.909,43	93,90	1.752.101.099.431,13
5.2	BELANJA MODAL	211.457.132.344,00	183.314.097.805,05	86,69	189.949.646.989,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	687.807.500,00	672.654.000,00	97,80	4.690.642.967,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.957.890.727,00	54.023.537.933,00	93,21	85.976.147.644,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.969.828.111,00	39.123.065.723,76	95,49	53.812.721.318,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.855.884.064,00	63.775.377.784,22	73,43	22.631.784.076,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.805.169.879,00	22.954.314.424,00	105,27	22.838.350.984,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.180.552.063,00	2.765.147.940,07	86,94	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	211.457.132.344,00	183.314.097.805,05	86,69	189.949.646.989,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.753.252.485,00	53.013.101,00	1,12	361.250.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.753.252.485,00	53.013.101,00	1,12	361.250.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	4.753.252.485,00	53.013.101,00	1,12	361.250.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	396.129.404.265,00	286.569.930.178,00	72,34	262.711.105.571,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	34.164.458.665,00	24.497.854.156,00	71,71	28.289.169.476,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	361.964.945.600,00	262.072.076.022,00	72,40	234.421.936.095,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	396.129.404.265,00	286.569.930.178,00	72,34	262.711.105.571,00
	JUMLAH BELANJA	2.675.660.392.649,00	2.407.468.033.993,48	89,98	2.205.123.101.991,13
	SURPLUS/DEFISIT	(62.113.996.634,00)	61.673.003.096,94	(99,29)	11.745.204.848,23
6	PEMBIAYAAN DAERAH	62.113.996.634,00	62.113.996.634,00	100,00	50.368.791.785,76
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.113.996.634,00	62.113.996.634,00	100,00	55.925.791.785,76
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.113.996.634,00	62.113.996.634,00	100,00	55.925.791.785,76
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.113.996.634,00	62.113.996.634,00	100,00	55.925.791.785,76

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	5.557.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	5.557.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	5.557.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	62.113.996.634,00	62.113.996.634,00	100,00	50.368.791.785,76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	123.786.999.730,94	0,00	62.113.996.633,99

5. Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan daftar inovasi yang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 9
Daftar Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

NO.	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH
1.	Aplikasi e-Cuti	BKPSDM
2.	Sistem Reklame Online (SIREKO)	BPKPD
3.	Drive Thru	BPKPD
4.	YAN STARPA (Pelayanan Sadar Taat Bayar Pajak)	BPKPD
5.	Gebyar Desa Starpa	BPKPD
6.	TIM MENTARI	BPKPD
7.	GEBYAR SUBAK STARPA	BPKPD
8.	Relaksasi PBB (Perbup 45 Tahun 2022)	BPKPD
9.	Sweet Sunday	BPKPD
10.	Pan-G Denbukit (Pajak Layanan Digital Denbukit)	BPKPD
11.	PPAT ONLINE	BPKPD
12.	CALL CENTER	BPKPD
13.	BPHTB 2 IN 1 SERVICE	BPKPD
14.	DESA STARPA	BPKPD
15.	Cara Pembuatan Sabun Eco Enzym (COZY SOAP)	LINGKUNGAN HIDUP
16.	Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup	LINGKUNGAN HIDUP
17.	Budidaya Magot	LINGKUNGAN HIDUP
18.	SI PENYU (Sistem Permohonan Penyuluhan)	LINGKUNGAN HIDUP

19.	SINGAKU (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha)	LINGKUNGAN HIDUP
20.	. USB (Unit Sapu Bersih)	LINGKUNGAN HIDUP
21.	Mobil Edukasi	LINGKUNGAN HIDUP
22.	Sistem Informasi Penyuluh Lingkungan (SIMPUL)	LINGKUNGAN HIDUP
23.	BULE KEPO (Buleleng Kelola Sampah Organik)	LINGKUNGAN HIDUP
24.	Bank Sampah Induk (BSI) "E-Darling"	LINGKUNGAN HIDUP
25.	AYAM PLASTIK	PUTR
26.	Infrastruktur Daerah Handal Kertih Buleleng Sejahtera (Pengaspalan Dengan Limbah Plastik)	PUTR
27.	REDKAR	DAMKAR
28.	Posko DO	DISDIK
29.	Saraswati Awards	DISDIK
30.	WhatsApp Gangguan LPJU	DISHUB
31	Pendataan Kondisi Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten dengan menggunakan google form	DISHUB
32	SIPUTRI (Sistem Informasi Pupuk Tricoderma) Solusi Pupuk Hayati Murah Bagi Petani	DISTAN
33	Penggunaan Perangkat Likat Kuning untuk Pengendalian OPT Tanaman	DISTAN
34	Aplikasi Penggunaan Pupuk PSB (Photosyntetic Bacteria) pada Budidaya Padi Sawah	DISTAN
35	DALI HAMBA (Pengendalian Hama Dengan Pestisida Daun Mimba) Solusi Pengendalian OPT secara Aman, Murah dan Ramah Lingkungan	DISTAN
36	Pembuatan Jadam Sulfur	DISTAN

37	Penanaman padi dengan system tanam SRI (System of Rice Intensification)	DISTAN
38	Pembuatan Silase	DISTAN
39	Kerjasama antara Disdukcapil dengan rumah sakit,dan rumah bersalin dan praktek Mandiri Bidan dalam penerbitan Akta Kelahiran bagi bayi baru lahir	DISTAN
40	. “Digitalisasi Arsip SPJ” (DIGAS)	DISPERKIMTA
41	SIPERMATA (Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	DISPERKIMTA
42	Pusat Kesejahteraan Sosial Gesit Cepat Tanggap (PUSKESOS GCT) KABUPATEN BULELENG	DINSOS
43	Scan Kode QR Survey kepuasan masyarakat	DISNAKERTRASN
44	GERBANG PURA (Gerakan Bangun Potensi Usaha Rakyat)	KANTOR CAMAT TEJAKULA
45	Pelayanan Prima KITA BISA	KANTOR CAMAT TEJAKULA
46	Jemput Bola Perekaman KTP-El	KANTOR CAMAT TEJAKULA
47	PILKB Andalan ASN Buleleng	BKPSDM
48	Mobil Unit Pelayanan Tim KB Keliling Gratis	DPPKBPPPA
49	JAYAPRANA	DISDUKCAPIL
50	AKU Online	DISDUKCAPIL
51	Healing Garden Inovasi Pelayanan Berbasis Environment Healing pada Pasien Rawat Inap	RSUD
52	Automatic Laboratorium Information System (A-Lis)	RSUD

6. PENUTUP

Berbagai kemajuan yang telah dicapai tentunya atas kerjasama yang baik dari semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta pihak swasta, LSM, Pers dan segenap masyarakat Kabupaten Buleleng atas segala kontribusinya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Atas segala kekurangan yang terjadi, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, dengan harapan yang sangat tinggi agar tahun depan semua kekurangan tersebut dapat diperbaiki.

Singaraja, 19 Maret 2025



